

**PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU  
REPUBLIK INDONESIA (PPLP DASMEN PGRI) JAWA TIMUR TAHUN 2002-2005**

**Novita Risdiana Anggraini Ningsih**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya  
E-Mail: [jasmine\\_nouna@yahoo.com](mailto:jasmine_nouna@yahoo.com).

**Suparwoto**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP Dasmen PGRI) merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan PGRI. PPLP Dasmen PGRI dibagi dalam berbagai cabang, salah satunya cabang provinsi. PPLP cabang provinsi Jawa Timur berada di Surabaya. PPLP merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab terhadap keadaan sekolah-sekolah PGRI. PPLP ini dibentuk untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan pemerataan pendidikan di Jawa Timur. PPLP di Jawa Timur merupakan lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 1981 di Surabaya dengan nama Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI). Namun pada tahun 2002 terjadi perubahan nama dari YPLP PGRI menjadi PPLP Dasmen PGRI.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diambil dua rumusan masalah (1) Bagaimanakah latar belakang pendirian PPLP PGRI Jawa Timur tahun 2002; (2) Bagaimanakah upaya PPLP PGRI Jawa Timur dalam melaksanakan perannya di sekolah PGRI Jawa Timur tahun 2002-2005. Metode yang digunakan adalah metode sejarah meliputi heuristik, yaitu mengumpulkan sumber primer dan skunder. Selanjutnya melakukan uji validitas sumber dengan kritik intern yang berguna untuk menyeleksi sumber menjadi fakta. Fakta-fakta tersebut kemudian diinterpretasikan dengan cara mencari hubungan antar fakta. Terakhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui latar belakang pendirian PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur, menganalisis upaya PPLP Dasmen PGRI dalam melaksanakan perannya dalam dunia pendidikan tahun 2002-2005.

Latar belakang terjadinya perubahan nama YPLP menjadi PPLP Dasmen karena adanya peraturan UU No. 16 tentang yayasan dan UU Sisdinas pasal 53 ayat 1 mendorong yayasan untuk mengubah namanya. Perubahan nama YPLP PGRI menjadi PPLP Dasmen PGRI. Pendidikan merupakan proses yang harus terus menerus dan saling berkesinambungan dari masa ke masa yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat untuk peningkatan taraf dan kualitas kehidupan. PPLP ini khusus menangani sekolah yang berada dalam naungan PGRI. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan PPLP. PPLP melakukan upaya dalam (1) fasilitas sarana; (2) kesejahteraan Guru; (3) mutu kualitas PBM; dan (4) mutu pendidikan. Hasil adanya upaya PPLP dalam sekolah PGRI dengan diakuinya sekolah PGRI dengan akreditasi A 36 dan akreditasi B dengan jumlah 487, dan jumlah akreditasi C sebanyak 47. Sedangkan yang tidak ter-akreditasi hanya 11 sekolah. Upaya ini berdampak untuk memberikan kepercayaan masyarakat agar percaya terhadap sekolah PGRI. Kepercayaan masyarakat kepada sekolah PGRI akan membuat sekolah PGRI tetap bertahan dan berkembang.

**Kata kunci:** PPLP Dasmen PGRI, Jawa Timur, 2002-2005

**Abstract**

*Patrons Society Institute for Primary and Secondary Education Teachers Association of the Republic of Indonesia (PPLP Dasmen PGRI) is an educational institution in under protection of PGRI. PPLP Dasmen PGRI consist of subdivision, one of in Provincial. PPLP east java live in Surabaya. PPLP responsible for state of school PGRI. The purpose PPLP to appearance educational in east java to be good and quality. But reality quality of educational in Indonesia very low. See the purpose of PPLP east java, we will know result of work PPLP Dasmen PGRI. PPLP in east java founded since 1981 in Surabaya with name Foundation Trustees Institutions of the Indonesian Teachers Association (YPLP PGRI). But in 2002 name YPLP change to be PPLP Dasmen PGRI.*

*Based the background, there are two formulation of the problem (1) what is the background of the establishment of PPLP Dasmen PGRI in east java 2002; (2) how means of PPLP Dasmen PGRI east java 2002-2005. The used method is the historical method includes heuristic, which collects primary and secondary source. Do test the validity of the source with internal criticism useful for selecting sources into facts. The facts then interpreted with search relationship between*

facts. Finally is historiography or historical writing. The purpose this research is to know background of the establishment of PPLP Dasmen PGRI east java. Analyze means PPLP Dasmen PGRI east java 2002-2005.

Background of the change of YPLP become PPLP Dasmen PGRI because there are law regulations No. 16 about the foundation and UU SIKDISNAS 1989. This is push of foundation to change name. The background of this change because educational is a process must be continuously and each continuity with purpose to make intelligent community to increasing quality in life. Efforts PPLP in (1) facilities; (2) teacher welfare; (3) quality of PBM; and (4) quality education. The result is 36 school PGRI accreditations A, 487 accreditation B, 47 accreditation C and 11 with accreditation D. The effect of PPLP Dasmen PGRI it make confidence to community and school of PGRI survive and thrive.

**Keywords:** PPLP Dasmen PGRI, East Java, 2002-2005

## A. Pendahuluan

Guru merupakan elemen penting dalam dunia pendidikan. Guru tidak hanya berperan dalam memberikan pengajaran kepada siswa tetapi juga berperan dalam organisasi profesi. Organisasi profesi ini merupakan organisasi yang mewadahi aspirasi guru. Adanya organisasi profesi guru dapat meningkatkan kompetensi, mengadakan permasalahan yang berkaitan dengan keprofesian.<sup>1</sup> Menurut Sugarda Poerbakawatja, guru dalam masyarakat Jawa diartikan sebagai seseorang yang memberi atau melaksanakan tugas pendidikan, tugas untuk mendidik.<sup>2</sup>

Guru yang sebagian besar waktu, tenaga dan pikirannya digunakan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada orang lain di sekolah atau lembaga pendidikan formal. Guru sebagai sebuah pekerjaan profesi memiliki organisasi profesional bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI memiliki misi untuk memikirkan bagaimana guru bisa lebih berkualitas, lebih profesional dan lebih sejahtera. Kalau pemerintah secara materi belum mampu, maka organisasi PGRI ini mestinya melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut.<sup>3</sup>

Organisasi guru di Indonesia sudah berdiri sejak jaman Belanda. Pada tahun 1912 berdiri organisasi perjuangan guru pribumi dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah dan pemilik sekolah. Sejalan dengan itu berkembang pula beberapa organisasi guru baru antara lain (1) persatuan guru bantu (PGB); (2) perserikatan guru desa (PGD); dan (3) persatuan guru *Ambachtsschool* (PGAS).<sup>4</sup>

para guru melakukan kongres guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Kongres

guru ini menyatakan semua guru bersatu dalam satu organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Tujuan utama pendirian PGRI adalah (1) Membela dan mempertahankan Republik Indonesia (organisasi perjuangan); (2) Memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar kerakyatan (organisasi profesi); (3) Membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya (organisasi ketenagakerjaan).<sup>5</sup>

Menurut Rusli Yunus, sejak awal berdirinya sampai masa orde baru berakhir, PGRI menjadi organisasi profesi keguruan satu-satunya di Indonesia. Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan pemerintah orde baru salah satunya diwujudkan mono-organisasi guru.<sup>6</sup> Kebijakan tersebut bertujuan agar guru bisa terorganisasi dalam sebuah naungan dan dapat terkontrol dengan mudah tanpa adanya perpecahan. PGRI menjadi sebuah organisasi guru raksasa yang berfungsi untuk menaungi aspirasi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru. Selain itu PGRI turut berperan serta dalam memberdayakan pendidikan Indonesia lewat program kerja yang disusun dalam setiap kongres. Sesuai dengan anggaran dasar PGRI BAB I pasal 1 menyebutkan bahwa sifat dari organisasi ini sebagai organisasi perjuangan dan organisasi profesi.<sup>7</sup>

Kesadaran terhadap perjuangan serta amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar inilah yang membangkitkan semangat dan tanggung jawab semua Guru Indonesia yang tergabung dalam PGRI. Namun berbagai masalah pendidikan yang harus diperhatikan, khususnya para guru. Kualitas guru atau pendidik juga memegang peran yang sangat besar dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kualitas guru Indonesia saat ini sangat memprihatinkan.<sup>8</sup> Berdasarkan data tahun 2002/2003, dari 1,2 juta guru SD saat ini, hanya 8,3% nya yang berijazah sarjana.<sup>9</sup> Realita tersebut akan mempengaruhi kualitas anak didik yang dihasilkan. Padahal dalam peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun

<sup>1</sup> Anggaran dasar Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) BAB I nama, sifat, waktu dan kedudukan, pasal 1

<sup>2</sup> Soegarda Poerbakawatja dan HAH Harahap. 1982. *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta :Gunung Agung. Hlm 245

<sup>3</sup> Tilaar, H.A.R. 1995. *Lima puluh tahun pendidikan nasional 1945-1995 suatu analisis kebijakan*. Jakarta : PT.Grasindo. Hlm 295

<sup>4</sup> PD PGRI. 2003. *Sejarah dan jati diri perjuangan PGRI*. Surabaya: PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur. Hlm 08

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm 297

<sup>6</sup> Slamet I, Rusli Yunus. 1985. *Sejarah Ringkas PGRI*, Jakarta: YPLP PGRI. Hlm 10

<sup>7</sup> Anggaran dasar Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) BAB I nama, sifat, waktu dan kedudukan, pasal 1

<sup>8</sup> Tilaar, H.A.R. *Op. Cit.* Hlm 299

<sup>9</sup> Republika Online. Mutu kualitas pendidikan. Selasa, 06 Mei 2004

2005 tentang standar Nasional Pendidikan Pasal 29 menegaskan kualifikasi guru mulai jenjang PAUD-SLTA minimal D-IV dan Sarjana S1.<sup>10</sup>

Selain itu, terdapat masalah dalam mensejahterakan guru yang sudah tidak menjadi rahasia umum. Tingkat kesejahteraan guru-guru sangat memprihatinkan. Penghasilan para guru, dipandang masih jauh dari mencukupi, apalagi bagi guru yang masih berstatus sebagai guru bantu atau guru honorer. Kondisi ini telah menjadikan para guru untuk mencari penghasilan tambahan, di luar dari tugas pokok mereka sebagai pengajar, termasuk berbisnis di lingkungan di mana mereka mengajar. Peningkatan kesejahteraan guru yang wajar dapat meningkatkan profesionalisme guru, termasuk dapat mencegah para guru melakukan praktek bisnis di sekolah.<sup>11</sup>

Untuk menunjang kinerjanya, PGRI memiliki sejumlah anak lembaga, salah satunya yaitu YPLP/PPLP (Yayasan/Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan) PGRI yaitu badan penyelenggara yang membina lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan PGRI.<sup>12</sup>

Yayasan adalah suatu badan hukum yang diadakan dengan akta notaris yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan.<sup>13</sup>

Keberadaan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan menarik untuk dikaji karena *pertama*, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan ini merupakan anak lembaga yang menaungi sekolah PGRI se Jawa Timur; *kedua*, sekolah PGRI merupakan sekolah yang sudah terkenal nakal di lingkungan masyarakat. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana kinerja dari PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur terhadap sekolah PGRI yang berada dalam naungannya.

Terdapat beerbagai masalah yang terjadi di pendidikan Indonesia dimana secara umum rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia berkaitan dengan belum adanya standarisasi yang ketat berkaitan dengan kualitas. Keadaan dunia pendidikan yang tanpa standar selama ini diperparah lagi dengan kecenderungan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang tidak efektif dan efisien. Banyak lembaga pendidikan melaksanakan proses pembelajaran hanya sebagai formalitas, yang penting meluluskan peserta didik.<sup>14</sup> Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang PPLP Dasmen PGRI, serta untuk mengetahui kinerja PPLP Dasmen PGRI.

Penelitian menfokuskan pada tahun 2002 karena pada tahun 2002 terjadi pergantian nama dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI) menjadi Perkumpulan Pembina

Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP Dasmen PGRI). Dan diakhiri pada tahun 2005 karena berakhirnya masa jabatan pengurus PPLP dan untuk mencermati evaluasi kinerja PPLP Dasmen PGRI pasca perubahan nama YPLP PGRI menjadi PPLP Dasmen PGRI.

Penelitian untuk PPLP PGRI ini sangat menarik untuk dikaji, karena Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan bertanggung jawab terhadap sekolah PGRI. Sekolah PGRI merupakan sekolah yang terkenal nakal sehingga para orang tua enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah PGRI. Beberapa karya yang membicarakan sejarah pendidikan di Jawa Timur namun belum ada yang membahas Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah latar belakang pendirian PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur tahun 2002? (2) Bagaimanakah upaya PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur tahun 2002-2005? (3) Bagaimanakah dampak keberadaan PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur?

Metode merupakan seperangkat aturan atau prosedur kerja. Setiap disiplin ilmu mempunyai metodologi penelitian yang berbeda-beda. Dalam konteks penelitian ini, termasuk dalam disiplin ilmu sejarah dengan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode ini terdiri dari 4 tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Tahap heuristik merupakan tahap dalam mencari data dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang diperoleh melalui Perpustakaan Nasional dimana penulis mendapatkan sumber koran yang menjelaskan keadaan pendidikan di Indonesia, Perpustakaan Daerah Surabaya penulis mendapatkan buku seperti potret guru, sejarah pendidikan di Jawa Timur, Kantor PGRI Jawa Timur mendapatkan data tentang susunan pengurus yayasan PGRI Jawa Timur, Kantor PPLP Dasmen PGRI mendapatkan data tentang program kerja PPLP Dasmen PGRI.

Sumber sejarah yang diperoleh dalam bentuk dokumen tertulis seperti surat kabar dan arsip negara. Berisi tentang data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Kemudian informasi dalam sumber sejarah tersebut di uji kebenarannya dan dicari keberadaannya. Sumber yang digunakan dalam penelitian sejarah ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Tahapan selanjutnya adalah kritik. Kritik sumber yang dilakukan penulis adalah melalui proses pembacaan sumber tertulis yang telah ditemukan, dengan begitu data kemudian dapat diseleksi, ditelaah dan dipilah-pilah dan diuji kebenarannya.<sup>15</sup> Penulis menggunakan kritik intern dalam penulisan ini dengan apa yang tampak semata ataupun yang dapat dilakukan dari informasi yang menerangkan kejadian tersebut.

<sup>10</sup>*ibid*

<sup>11</sup>Harian Pikiran Rakyat. masalah kesejahteraan guru. Rabu, 20 Juli 2000

<sup>12</sup>Musaheri. 2011. Ke-PGRI-an. Yogyakarta: New Elmatera. Hlm 153

<sup>13</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *Juncto* Pasal 1 Ayat 1

<sup>14</sup>Tilaar.*op. cit.* Hlm 300

<sup>15</sup>Aminuddin Kasdi, 2005, *Memahami Sejarah*, Surabaya : Unesa Press, hlm 8.

Kritik intern yang dilakukan penulis menemukan fakta bahwa PPLP Dasmen PGRI merupakan Yayasan Pendidikan yang berada di bawah naungan PGRI. PPLP Dasmen PGRI ini bergerak dalam bidang Pendidikan. PGRI ikut serta dalam mencerdaskan Bangsa Indonesia dan mensejahterakan para guru, khususnya guru yang mengajar di Sekolah lingkungan PGRI.

Metode selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi atau penafsiran merupakan pengumpulan fakta-fakta tersebut secara koheren yang disusun secara sistematis dan kronologis sehingga membentuk sebuah eksplanasi narasi sejarah yang runut dan kronologis untuk mengungkapkan kembali suatu peristiwa. Tahapan interpretasi merupakan suatu proses mendeskripsikan secara kritis analitis sesuai dengan tema penelitian yang akan menjawab rumusan masalah. Pada tahapan ini penulis akan menginterpretasikan fakta-fakta sejarah tentang latar belakang pendirian YPLP PGRI Jawa Timur, perubahan nama YPLP PGRI menjadi PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur, struktur organisasi PPLP, dan perkembangan kegiatan serta peran PPLP dalam dunia pendidikan.

Tahapan terakhir yaitu Historiografi. Pada tahapan ini peneliti akan menyajikan hasil interpretasi dari Upaya Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Jawa Timur tahun 2002-2005 di Jawa Timur secara kronologis. Hasil interpretasi ini dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang sifatnya kronologis memperjelas tema penelitian sesuai kaidah penelitian sejarah dan metode sejarah.

## B. Hasil Dan Pembahasan

Sebutan "Persatuan Guru Republik Indonesia" (PGRI) adalah nama lengkap dari organisasi profesi guru Indonesia yang didasari dari semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Yayasan PGRI secara umum bertujuan untuk turut serta dalam menyukseskan Pembangunan Nasional, khususnya dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Yayasan PGRI di Jawa Timur didirikan pada tanggal 13 November 1975, sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia Daerah VIII Jawa Timur No. 44 pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 1975 dengan Notaris Anwar Mahayudin di Surabaya.<sup>16</sup> Yayasan ini bernama Yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia Daerah VIII Jawa Timur yang disingkat "Yayasan PGRI Jatim" dan bertempat tinggal di Surabaya. Surabaya dipilih menjadi tempat yayasan ini berdiri dikarenakan Surabaya merupakan ibukota Jawa Timur. Yayasan PGRI Jawa Timur melakukan berbagai macam usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dengan cara: (1) Membantu pemikiran dan pelaksanaan program-program pendidikan dan kebudayaan yang menjadi garis kebijaksanaan

pemerintah; (2) Menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan kesempatan belajar; (3) Mempertinggi tingkat pengetahuan para anggota PGRI baik pengetahuan keahlian maupun pengetahuan umum; (4) Membina usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan para anggota PGRI; (5) Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan kebudayaan baik negeri maupun swasta serta pihak-pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan yayasan.<sup>17</sup>

PGRI memiliki sejumlah anak lembaga, salah satunya yaitu YPLP/PPLP (Yayasan/Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan) PGRI yaitu badan penyelenggara yang membina Lembaga-Lembaga Pendidikan di lingkungan PGRI.<sup>18</sup> YPLP merupakan salah satu cabang organisasi PGRI. YPLP akan bertanggung jawab secara operasional kepada PGRI tingkat Kabupaten/Kota dan akan dilanjutkan ke YPLP provinsi dan YPLP Pusat.

YPLP sebagai lembaga pendidikan telah berhasil menyelenggarakan pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh YPLP adalah sekolah mulai dari (1) Taman Kanak-Kanak, (2) Sekolah Dasar, (3) Sekolah Menengah Pertama, (4) Sekolah Menengah Atas.

Yayasan sebagai badan hukum diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti halnya orang atau manusia. Yayasan memiliki hak hidup yang diatur dan diakui undang-undang.

Undang-undang No. 16 tahun 2001 menyebutkan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa tujuan pendirian yayasan harus ditujukan untuk bidang sosial, agama dan kemanusiaan. Secara khusus pemerintah mengharuskan berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial.<sup>19</sup> Namun pada kenyataannya YPLP merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang penyelenggara pendidikan mulai dari yang terendah sampai perguruan tinggi.<sup>20</sup>

Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tahun 1989 menyatakan bahwa "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah". Pasal tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa yayasan tidak diperkenankan lagi sebagai penyelenggara pendidikan sehingga YPLP sebagai lembaga pendidikan dengan adanya UU Sisdiknas tersebut secara otomatis

<sup>17</sup>Lihat Akta Notaris No. No.44 tanggal 13 Nopember 1975 tentang pendirian Yayasan PGRI Daerah VIII Jawa timur pasal 4

<sup>18</sup> Musaheri. 2011. Ke-PGRI-an. Yogyakarta: New Elmatera. Hlm 153

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

<sup>20</sup> I.Djumhur dan H. Danasuparta. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV. Ilmu. 1976. Hlm 131

<sup>16</sup> Akta Notaris Pendirian Yayasan PGRI Daerah VIII Jawa Timur disingkat Yayasan PGRI Jatim, Notaris: Anwar Mahayudin Surabaya No.44 tanggal 13 Nopember 1975

tidak diperbolehkan menyelenggarakan lembaga pendidikan.

Apabila yayasan tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan pendidikan formal, maka akan terjadi kekosongan dalam penyelenggara pendidikan swasta sebab aset dan kemampuan yayasan tidak dapat dialih-pindah tangankan kepada pihak lain, kecuali ke yayasan yang memiliki kegiatan yang sama. Undang-Undang No. 16 tentang yayasan menyebutkan bahwa nama yayasan tidak boleh sama satu dengan yang lain.<sup>21</sup>

Berdasarkan UU Sisdiknas dan UU no 16 tentang yayasan seperti yang sudah dijelaskan diatas hal merugikan bagi pihak yayasan karena yayasan tidak bisa menyelenggarakan pendidikan. Adanya UU No. 16 tentang yayasan dan UU Sisdiknas pasal 53 ayat 1 mendorong yayasan untuk mengubah namanya karena hal tersebut merugikan bagi pihak yayasan karena:

Kegiatan YPLP secara khusus untuk menyelenggarakan pendidikan dilarang dan dibatasi haknya untuk ikut menyelenggarakan pendidikan padahal YPLP masih menyelenggarakan satuan pendidikan dan merupakan kegiatan utama.

YPLP mengalami pengurangan hak penyelenggaraan pendidikan formal secara langsung yang telah digelar berpuluh-puluh tahun.

YPLP kehilangan kemampuan, pengalaman, sistem penyelenggara, tata kelola, Tata kerja dan sejenisnya yang telah diperoleh, dipupuk dan dikembangkan selama puluhan tahun.

Selain merugikan bagi YPLP sendiri, hal tersebut juga merugikan masyarakat karena:

Peserta didik akan kehilangan atau mengalami pengurangan hak memperoleh pendidikan yang baik karena yayasan sebagai penyelenggara pendidikan harus berhenti sebagai penyelenggara pendidikan.

Peserta didik akan kehilangan tempat untuk belajar, karena aset yayasan sebagai penyelenggara pendidikan formal dilarang untuk dialihkan ke pihak lain.

Masyarakat akan mengalami kesulitan untuk menjalankan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal yang selama ini diselenggarakan oleh yayasan, karena harus membangun suatu tatanan baru dalam penyelenggaraan pendidikan formal termasuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.

YPLP sebagai lembaga pendidikan dengan adanya UU sisdiknas, UU no 16 berimbas kepada YPLP sendiri karena tidak diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan. selain merugikan YPLP juga merugikan bagi masyarakat karena pada dasarnya masyarakat yang bersekolah di sekolah PGRI adalah masyarakat yang tidak mampu dan peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri. Apabila UU tersebut berbunyi seperti diatas maka merugikan masyarakat dan juga YPLP sebagai penyelenggara pendidikan yang ingin mewujudkan pendidikan yang baik di Indonesia.

Yayasan yang bergerak di bidang penyelenggaraan pendidikan tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan pendidikan, sehingga yayasan

tersebut harus bubar atau membubarkan diri. Situasi tersebut mendorong yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan mau tidak mau harus membubarkan yayasan tersebut atau menaati peraturan pemerintah yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 pasal 62. Yayasan akan mengatur secara jelas bubarnya yayasan karena: jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: yayasan melanggar ketentuan umum dan kesusilaan; tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.<sup>22</sup>

Mengacu pada ketentuan Pasal 62 di atas, akan menyebabkan permasalahan bagi kelangsungan hidup yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dan kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang sekarang diselenggarakan oleh berbagai yayasan. Hal ini memperjelas bahwa yayasan yang semula menyelenggarakan pendidikan tidak lagi diperkenankan menyelenggarakan pendidikan.

UU Sisdiknas sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan, akan tetapi sekaligus merugikan yayasan dan menghilangkan hak untuk turut serta dalam menyelenggarakan pendidikan serta tidak adanya pengakuan eksistensi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. Tidak diakuiinya eksistensi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan berarti menimbulkan ketidakpastian bagi masa depan yayasan yang selama ini kegiatannya justru khusus sebagai penyelenggara pendidikan.

Untuk menjaga dan menjamin eksistensi, kontinuitas dan peningkatan kerja YPLP PGRI sebagai pembina dan penyelenggara lembaga pendidikan, sehingga perlu adanya penggantian nama YPLP PGRI . Dengan melihat beberapa aspek seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Keputusan Kongres PGRI ke 18 tahun 1989, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PGRI, Keputusan Mukernas V YPLP PGRI tahun 1999 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI. PGRI memutuskan untuk mengganti nama Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI) menjadi Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP Dasmen PGRI).

Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 2135/SK/PB/XVII/2002 tentang Penggantian nama YPLP PGRI menjadi PPLP Dasmen PGRI. PGRI Dati Jawa Timur mendirikan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur (PPLP Dasar dan Menengah PGRI Jawa Timur) yang berkedudukan di Surabaya tersebut membuat suatu Badan Hukum yang

<sup>21</sup> Undang-undang no. 16 tahun 2001 tentang yayasan

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 62

dibuat di Lawang di hadapan Notaris Rum Hardono, SH. Pendiri dari perkumpulan ini adalah:

1. Tuan doctorandus Johannes Hasjan Ladijanto
2. Tuan Sutarto Budikeroto, Bachelor of Arts
3. Tuan doctorandus H. Soenardi
4. Nyonya Doctoranda Hj. Moendisari Soenarjo
5. Tuan Doctorandus H. Slamet Welli Soetanto
6. Tuan Doctorandus H. Soekir
7. Tuan H. Moech Muslim S. Bachelor of Arts
8. Tuan Doctorandus H. Panindjo widyoko.<sup>23</sup>

Di dalam satu wilayah Provinsi dapat dibentuk PPLP Dasmen PGRI Provinsi. Setiap provinsi mempunyai visi misi yang berbeda namun tidak menyimpang dari visi dan misi PPLP PGRI Pusat. Visi dan misi PPLP PGRI Jawa Timur ialah:

#### 1. Visi

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas berdasarkan nilai-nilai kejuangan 1945, kebangsaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Visi PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur agar pendidikan di Indonesia lebih berkualitas, untuk mewujudkan visi tersebut maka sejalan dengan itu membentuk misi PPLP dasmen PGRI.

Misi PPLP Dasmen PGRI merupakan misi yang dibuat oleh pengurus PPLP dasmen PGRI Jawa Timur yang dilakukan secara musyawarah. Misi PPLP ini dapat dilihat di bawah ini:

#### 2. Misi

- a. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, profesional, mandiri dan penguasaan IPTEK, IMTAQ, berdaya saing serta berakhlak mulia
- b. Pendidikan yang demokratis menjangkau kepentingan rakyat banyak
- c. Melaksanakan manajemen pendidikan yang efisien, efektif, dan transparan
- d. Memperkokoh budaya nasional.<sup>24</sup>

Misi PPLP dasmen PGRI Jawa Timur merupakan visi misi yang dibuat berdasarkan keadaan pendidikan yang ada di Jawa Timur namun tidak menyimpang dari visi misi PPLP PGRI pusat. Visi dan misi PPLP PGRI adalah ingin mewujudkan Pendidikan di Indonesia agar pendidikan di Indonesia berkualitas yang sesuai dengan nilai kebangsaan dan keimanan.

<sup>23</sup> Lihat Akta Notaris tentang Pendirian Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur disingkat PPLP Dasar dan Menengah PGRI Provinsi Jawa Timur, Notaris: Rum Hardono, SH Lawang-Malang No. 20 tanggal 29 Juli 2002 Pasal 8

<sup>24</sup> PPLP DASMEN PGRI Provinsi Jawa Timur. 2011. *Program Kerja PPLP Dikdasmen PGRI Provinsi Jawa Timur tahun 2011/2012*. Surabaya disampaikan pada rapat kerja daerah PPLP DASMEN PGRI Provinsi Jawa Timur tanggal 19-20 Oktober 2011 Hlm 2

Pengurus PPLP PGRI Pusat berwenang untuk memberikan konsultasi dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas PPLP Dasmen PGRI Provinsi dan mengukuhkan pengurus PPLP Dasmen PGRI Provinsi.

Pengurus PPLP Dasmen PGRI Provinsi mengukuhkan PPLP Dasmen Kab/Kota, PPLP Dasmen Kab/kota berada dibawah pengawasan PPLP Dasmen Provinsi. PPLP Dasmen PGRI Provinsi wajib menegakkan disiplin organisasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi lainnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPLP Dasmen PGRI Kab/Kota wajib menegakkan disiplin organisasi atas dasar pelimpahan wewenang dari PPLP Dasmen PGRI Provinsi.

Lembaga pendidikan Dasmen dalam wilayah provinsi, diurus dan menjadi tanggung jawab PPLP Dasmen PGRI Provinsi. Lembaga pendidikan Dasmen dalam wilayah Kab/Kota diurus dan menjadi tanggung jawab PPLP Dasmen PGRI Kab/Kota dengan dibina dan dikoordinasi dari PPLP Dasmen PGRI Provinsi. Segala sesuatu mengenai kebijakan dan kepentingan penyelenggara lembaga pendidikan PGRI yang berhubungan dengan instansi tingkat pusat menjadi tanggung jawab PPLP PGRI Pusat. PPLP Pusat, PPLP Provinsi dan PPLP Kab/Kota di bawah pengawasan PGRI.<sup>25</sup>

Tujuan PPLP ini adalah untuk mewujudkan pendidikan yang baik di Jawa Timur. PPLP mempunyai beberapa pengurus, pengurus PPLP wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam forum organisasi sesuai dengan tingkatannya.

Susunan pengurus organisasi terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Anggota. Setiap organisasi mempunyai tugas masing-masing dimana Pengurus tersebut bertanggung jawab sesuai dengan jabatannya.

PPLP membantu masyarakat dan pemerintah dalam usaha melaksanakan program pendidikan nasional, yaitu membina dan mengelola Lembaga Pendidikan PGRI. Lembaga Pendidikan PGRI berada di bawah naungan PPLP Dasmen PGRI yang bertanggung jawab atas segala penyelenggaraan mutu pendidikan. PPLP Dasmen PGRI berada di bawah koordinasi PGRI Provinsi. PPLP Dasmen PGRI dan PGRI provinsi berlokasi di jln. A.Yani No. 6-8 Surabaya.

Lembaga pendidikan yang dikelola di bawah naungan PGRI daerah Jawa Timur secara otomatis masuk dalam naungan PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1: Keadaan Lembaga Pendidikan PGRI Jawa Timur tahun 2001**

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1.	TK PGRI	410	6.301	721
2.	SD PGRI	1	99	8
3.	SLB PGRI	14	130	50

<sup>25</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPLP PGRI pasal 31, 32, dan 33

4.	SLTP PGRI	375	54.094	6.417
5.	SMU PGRI	104	32.088	2.723
6.	SMK PGRI (Teknologi dan Industri)	56	39.896	2.035
7.	SMK PGRI (Bisnis dan Manajemen)	70	42.137	3.072
8.	lain-lain*	14	1.527	188
	Jumlah	1.044	176.272	15.214

Sumber: PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur, 2001

keterangan:

\* = sekolah lain-lain meliputi

1. MTs PGRI : 10
2. SMK Grafika PGRI : 1
3. SMKK PGRI : 2
4. SMK Pariwisata : 1

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa keadaan umum sekolah yang dikelola PPLP PGRI di Jawa Timur pada tahun 2001 memiliki jumlah sekolah lebih dari 1.000 buah yang terdiri dari (1) Taman Kanak-Kanak; (2) Sekolah Dasar, (3) Sekolah Menengah Atas; dan (4) Sekolah Luar Biasa. Sekolah merupakan tempat berkumpulnya para peserta didik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang dimiliki sekolah dengan label "PGRI" berjumlah 176.272 dengan memiliki murid 15.214. Sekolah-sekolah dengan label "PGRI" ini secara otomatis berada di bawah naungan PPLP.

PPLP Dasmen PGRI mempunyai beberapa program yang disusun berdasarkan Kebijakan Pendidikan Nasional dan berpedoman pada PPLP Dasmen PGRI Pusat serta PPLP Dasmen PGRI Provinsi Jawa Timur dimana program kerja tersebut berpedoman pada tiga pilar kebijakan pendidikan yaitu :

- a. Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan,
- b. Peningkatan mutu relevansi dan daya saing output pendidikan, dan
- c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Program kerja yang dibuat dengan melihat keadaan pendidikan yang ada di Jawa Timur yang akan berganti program menyesuaikan program pendidikan nasional setiap lima tahun sekali. PPLP berpedoman pada tiga pilar kebijakan pendidikan dengan tujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Berorientasi pada tiga pilar kebijakan pendidikan tersebut, maka Program kerja Dikdasmen Provinsi Jawa timur pada dasarnya akan meladad terlaksanakan:

- a. Membantu Pemerintah menyukseskan perintah wajib belajar 12 tahun,
- b. Meningkatkan profesionalisasi Tenaga Kependidikan,
- c. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan,
- d. Melaksanakan pendidikan karakter bangsa
- e. Melaksanakan konsolidasi organisasi dan manajemen pendidikan, dan

- f. Memperkokoh pengembangan kebudayaan nasional.<sup>26</sup>

PPLP PGRI menentukan beberapa program dalam kinerjanya dengan melihat kebijakan yang digunakan pemerintah. Program PPLP PGRI tidak menyimpang dari tujuannya yaitu untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Untuk itu pembagian Program kerja PPLP PGRI dibagi dalam berbagai bidang (1) Bidang Umum; (2) Bidang Organisasi; (3) Bidang Dikdasmen; dan (4) Bidang Keuangan.

Peran PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur dalam meningkatkan pendidikan ialah (a) penyelenggara dan penanggung jawab sekolah secara hukum; (b) pemberi mandat dan tanggung jawab pengelola sekolah; dan (c) pengendali pengelolaan sekolah.<sup>27</sup>

PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur dalam mengupayakan perannya dalam dunia pendidikan sudah menyusun program kerja yang sudah dijelaskan diatas. PPLP ini khusus menangani sekolah yang berada dalam naungan PGRI. pada umumnya sekolah PGRI adalah sekolah yang terkenal dengan siswa yang nakal sehingga orang tua murid enggan untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah PGRI. Hal yang dilakukan sekolah PGRI agar menarik perhatian masyarakat dengan membuat promosi yang digunakan, diantaranya:

- a. Brosur

Brosur adalah alat promosi berupa media cetak. Media ini biasanya digunakan setahun sekali yaitu sebelum ajaran baru yang dimulai pada bulan mei dan juni. Brosur ini berbentuk lembaran lipat yang secara rinci menjelaskan gambaran umum sekolah seperti, denah lokasi, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, penawaran program/jurusan, prestasi yang sudah diraih, sarana dan prasarana yang dimiliki, tenaga pendidik, kurikulum yang digunakan, dan biaya pendidikan.

- b. Spanduk

Spanduk adalah media cetak yang biasanya dipasang di tempat-tempat strategis berupa kain atau sejenisnya yang digunakan untuk pengumuman dan mempromosikan sesuatu. Pemasangan spanduk dilakukan setahun sekali pada tahun ajaran baru. Spanduk ini ditempatkan ditempat yang sering dilalui banyak orang, seperti pasar, terminal, pagar jalan raya dan sekolah.<sup>28</sup>

Selain itu sekolah PGRI, PPLP juga meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah PGRI, PPLP berupaya meningkatkan penampilan dan pemberdayaan lembaga pendidikan PGRI agar tetap eksis dan berkembang sehingga diminati masyarakat. Upaya yang dilakukan PPLP dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah PGRI dengan (1) melakukan supervisi pendidikan oleh para pengawas secara kontinue; (2)

<sup>26</sup> PPLP DIKDASMEN PGRI Provinsi Jawa Timur. *Op.cit.* Hlm 1

<sup>27</sup> PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur. *op.cit.* Hlm 12.

<sup>28</sup> Wawancara dengan bapak Moch. Zen, selaku kepala sekolah SMA PGRI 1 Mojosari, pada tanggal 20 juli 2014, pukul 16.00 WIB

mengadakan rapat kerja atau pembinaan bersama kepala sekolah TK, SMP, SMA dan SMK PGRI se Jawa Timur; (3) menyelenggarakan Porseni SLTP/SLTA dan (4) melaksanakan lomba sekolah contoh.<sup>29</sup>

Jumlah sekolah yang telah disupervisi oleh pengawas PPLP dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 2 Jumlah sekolah yang telah disupervisi pengawas tahun 2002-2005**

No.	Nama Pengawas	Jenis dan Jumlah Sekolah yang Disupervisi				Jumlah
		TK	SMP	SMA	SMK	
1.	H. Soedarno Ilham	19	28	16	18	81
2.	Dra. Hj. Soetjina Herwati	10	14	3	16	43
3.	Drs. H. Soemaryono Aliwinoto		23	16	15	54
4.	Drs. Marlan		4	9	7	20
5.	Drs. Soeharto		2	5	15	22
6.	Drs. H. M Sigit Purnomo	7	11	4	9	31
7.	Drs. H. Aloewi	10	21	8	8	47
8.	Drs. Maoerlan	3	6	2	1	12
	jumlah					310

Sumber: arsip PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur

Dari tabel diatas diketahui selama 3 tahun, para pengawas hanya melakukan pengawasan sebanyak 310 sekolah. Hal tersebut dikarenakan kurang efektifnya para pengurus dan para pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Hasil selama pengawas melakukan pengawasan banyak yang ditemukan permasalahan yang ditemui sama dengan tahun sebelumnya. Permasalahan tersebut diantaranya (1) administrasi sekolah, dimana banyak buku induk siswa yang belum dikerjakan dengan tuntas seperti data siswa tidak terisi lengkap, pas foto waktu mulai masuk dan waktu keluar belum terisi dan terkadang kurang cap jari kiri, serta adanya data peserta UN dan kelulusan yang belum terselesaikan; (2) administrasi kepegawaian, dalam urusan kepegawaian belum ada program pengembangan profesi, karier dan pengkaderan, buku induk Guru/Pegawai isiannya kurang lengkap, belum memiliki buku ijin dan cuti Guru/Pegawai, belum memiliki tata tertib guru/pegawai dan daftar hadir guru/pegawai kurang teratur mengisinya; (3) administrasi keuangan, dalam masalah keuangan para sekolah PGRI menyimpan uang keuangannya rapat-rapat agar tidak diketahui pihak PPLP dikarenakan PPLP hanya menerima uang dari pihak sekolah saja tanpa memberikan kepada pihak sekolah lagi, sehingga pada waktu melakukan pengawasan menemukan buku kas

<sup>29</sup> PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur. 2002. *Kegiatan PPLP Dasmen PGRI Provinsi Jawa Timur*. surabaya: PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur. Hlm 13

yang mengisinya kurang teratur dan penyimpanannya tidak mudah ditemukan.<sup>30</sup>

Selain melakukan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh para pengawas, PPLP juga mengadakan rapat kerja/pembinaan bersama Kepala Sekolah TK, SMP, SMA, dan SMK se-Jawa Timur. Tujuan diadakan rapat tersebut untuk mengevaluasi dan melaporkan kinerja dari sekolah PGRI yang berada di bawah naungan PPLP.

Rapat kerja tersebut dilakukan setiap satu tahun sekali. Rapat kerja ini dilakukan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, relevan dan mampu berdaya saing dengan sekolah lainnya. Kegiatan lomba tersebut dapat dilihat melalui gambar foto di bawah ini:

**Gambar 3.1 Rapat kepala sekolah tahun 2002**



Sumber: dokumentasi arsip PPLP Jawa Timur, tahun 2002

Gambar Diatas merupakan salah satu kegiatan rutin setiap tahun PPLP dalam meningkatkan mutu pendidikan. Rapat kerja dilaksanakan di tempat yang sesuai dengan jadwal dan kesepakatan para pengurus PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja setiap sekolah PGRI. Rapat ini diadakan setiap satu tahun sekali dengan lama waktunya 3 hari. Rapat ini dilakukan secara bertahap mulai jenjang mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak sampai Menengah Atas/Kejuruan.

Rapat kerja ini diikuti oleh seluruh kepala sekolah PGRI se-Jawa Timur mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai menengah Atas. Kegiatan acara yang dilakukan pada saat rapat kerja ialah registrasi peserta, pembukaan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, lagu Mars PGRI, laporan ketua panitia, dan sambutan ketua PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur. Kemudian salah satu wakil sekolah mempresentasikan hasil kerjanya selama satu tahun mulai dari jenjang Sekolah Menengah pertama sampai menengah atas. Selain itu kegiatannya juga dilakukan dengan memberi informasi kepada setiap sekolah tentang keuangan dan dana abadi PPLP dan program kerja PPLP.

<sup>30</sup> PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur. 2005. *Laporan Kepengawasan PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur*. surabaya: PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur. Hlm 11

Program lomba sekolah contoh, PPLP melaksanakan program tersebut namun sekolah yang mengikuti lomba sekolah contoh ini hanya sedikit dikarenakan yang mengikuti lomba ini dipilih dari PPLP Dasmen PGRI Kab/Kota. PPLP Dasmen PGRI Kab/Kota ini hanya memilih sekolah yang sudah maju, sehingga sekolah lainnya yang tidak terpilih perkembangannya hanya bersifat statis. Perkembangan sekolah PGRI kebanyakan berasal dari jumlah murid yang bersekolah di sekolah PGRI.

Syarat untuk mengikuti lomba sekolah contoh yaitu (1) menemati tanah dan gedung milik sendiri; (2) sekolah potensial yang sedang berkembang minimal berstatus akreditasi B/ diakui; (3) belum pernah menjadi juara 1 lomba sekolah contoh; dan (4) diusulkan oleh PPLP Dasmen PGRI Kab/Kota yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Lomba sekolah contoh ini hanya diadakan untuk tingkat sekolah menengah pertama sampai menengah atas/kejuruan untuk mewujudkan sekolah PGRI sebagai pencitraan publik.

Dampak upaya yang dilakukan PPLP dengan meningkatkan mutu pendidikan agar menarik perhatian masyarakat. Dampak adanya PPLP ini dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. PPLP ini selalu berusaha meningkatkan sarana prasarana sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru sehingga menarik perhatian siswa. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar sekolah PGRI bisa bertahan dan berkembang.

### C. Penutup

#### Simpulan

Latar belakang berdirinya PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur untuk meningkatkan pendidikan di Jawa Timur. Menurut PPLP pendidikan merupakan proses yang harus terus menerus dan saling berkesinambungan dari masa ke masa yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat untuk peningkatan taraf dan kualitas kehidupan. Setiap warga negara Indonesia yang mempunyai rasa tanggung jawab dalam pembangunan Bangsa dan Negara wajib berperan serta untuk mewujudkan suatu kehidupan sosial menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tujuan PPLP dan rasa tanggung jawab serta cita-cita dalam mencerdaskan Bangsa dan Negara maka para pendiri PPLP ikut berperan serta dalam melaksanakan pendidikan. Para pendiri PPLP mengkaji dan mengembangkan potensi yang dapat mendukung program pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga para pendiri PPLP membentuk organisasi PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur. PPLP Dasmen PGRI Jawa Timur ini sangat penting untuk mewujudkan pendidikan di Jawa Timur. PPLP mempunyai peranan penting untuk mencerdaskan masyarakat dalam meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan.

### Saran

PPLP merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh PGRI untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Penulis mengharapkan program PPLP Dikdasmen PGRI bisa berkembang lebih baik dari segi pelayanan dan fasilitas yang diberikan, serta dalam mensosialisasikan program PPLP ini supaya sekolah PGRI bisa lebih mengikuti kegiatan PPLP dan mengetahui program PPLP Dikdasmen PGRI Jawa Timur.

### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Arsip

- Akta Notaris Pendirian Yayasan YPLP PGRI Daerah VIII Jawa Timur disingkat Yayasan PGRI Jatim, Notaris: Anwar Mahayudin Surabaya No.44 tanggal 13 Nopember 1975
- Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris: Soehartono, SH Surabaya No.183 tanggal 30 April 1981
- Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat "Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Notaris: Soehartono, SH
- Akta Notaris tentang Perubahan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru republik Indonesia (YPLP PGRI). Notaris: Soehartono, SH Surabaya No.33 tanggal 19 September 2000
- Akta Notaris No. 20 tanggal 29 Juli 2002 tentang Pendirian Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur disingkat PPLP Dasar dan Menengah PGRI Provinsi Jawa Timur, dengan notaris Rum Hardono, SH Di Lawang-Malang
- Anggaran dasar Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI )
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP/PPLP PGRI tahun 2002
- Informasi Kegiatan, Permasalahan dan Solusinya PPLP DIKDASMEN PGRI Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2002-2005
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendiknas No. 29 tahun 2005 tentang Akreditasi Sekolah
- Program Kerja YPLP PGRI Provinsi Jawa Timur Tahun 2000/2001-2004/2005.
- Sambutan presiden pada upacara pembukaan kongres PGRI XVI pada tanggal 3 juli 1989 di Istana Senayan Jakarta
- Surat Keputusan PPLP Dikdasmen PGRI No. 086/K/YPLP-PGRI/P/VII/2002
- Surat Keputusan PPLP Dikdasmen PGRI No. 157/C/PPLP-PGRI/X/2009 tentang tugas susunan pengurus PPLP Dikdasmen PGRI

<sup>31</sup>Loc., Cit

Surat keputusan Pengurus perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat No. 0446A/SK/PPLP-PGRI/P/VIII/2005

Surat Keterangan No. 133/E/PPLP-PGRI/IX/2008 tentang tambahan penjelasan usulan Guru Tetap Yayasan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2001 tentang yayasan

## 2. Koran dan Majalah

Kompas Jawa Timur. Derita Pendidikan di Jawa Timur. Kamis, 27 Juni 1970

Kompas Jatim. Rabu, 21 April 1980

## 3. Buku

Aminudin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa University Press.

Hadi supeno. 1995. *Potret Guru*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

I.Djumbuhur dan H. Danasuparta. 1976. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV. Ilmu.

Musaheri. 2011. *Ke-PGRI-an*. Yogyakarta: New Elmatara

M. Rusli Yunus. 2003. *Perjalanan PGRI (1945-2003) Menyongsong Kongres XIX PGRI di Semarang, 8-12 Juli 2003*. Jakarta : PB.PGRI.

PD PGRI Jawa Timur. 2000. *Sejarah Perjuangan dan Jati Diri PGRI*. Surabaya : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Provinsi Jawa Timur.

PPLP Dikdasmen PGRI Jawa Timur. 2000. *Panduan Lomba Sekolah Contoh di Lingkungan Pembinaan PPLP Dikdasmen PGRI Jawa Timur*. Surabaya: PPLP Dikdasmen PGRI Jawa Timur.

PPLP Dikdasmen PGRI Jawa Timur. 2003. *Pedoman Pengelolaan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah PGRI di Jawa Timur*. Surabaya: PPLP Dikdasmen PGRI Jawa Timur.

PPLP Dikdasmen PGRI Jawa Timur. 2001. *Penjelasan singkat kegiatan dana abadi PPLP Dikdasmen PGRI Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: PPLP Dikdasmen PGRI Jawa Timur.

Rafli Kosasi Soetjipto. 1996. *Profesi Keguruan*. Jakarta : proyek pembinaan dan mutu pendidikan

S. Nasution. 1987. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Jemmars.

Slamet I, Rusli Yunus. 1985. *Sejarah Ringkas PGRI*, Jakarta: YPLP PGRI

Soegarda Poerbakawatja dan HAH Harahap.1982. *Ensiklopedia Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung

H.A.R. Tilaar. 1995. *Lima puluh tahun pendidikan nasional 1945-1995*. Jakarta : PT. Grasindo

\_\_\_\_\_. 2001. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

## 4. Wawancara

Wawancara dengan Soenardi (Sekretaris PPLP Dikdasmen PGRI Jawa Timur periode 2000-2005), di Jl.A. yani No.6-8 Surabaya, tanggal 10 Juni 2014, pukul 11:00 WIB

Wawancara dengan Sudarman (Kepala Tata Usaha PPLP Dikdasmen PGRI Jawa Timur), di Jl.A. yani No.6-8 Surabaya, tanggal 19 Juni 2014, pukul 13:00 WIB.

Wawancara dengan Moch. Zen (Kepala sekolah SMA PGRI 1 Mojosari), di Dsn. Lamongan, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, tanggal 20 Juli 2014, pukul 16:00 WIB.

Wawancara dengan Abdul Aziz (Guru SMP PGRI 1 Mojosari), di Perumahan Pungging Blok D no. 04 Kab. Mojokerto, tanggal 18 Juli 2014, pukul 19.30 WIB

Wawancara dengan bapak Budi Santoso, selaku ketua PPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten Mojokerto, di Jl. Mojosari pacet No. 08 Kutorejo, pada tanggal 19 Juli 2014, pukul 15.00 WIB